

**PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK
ATAS TANAH YANG DIBEBAHKAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN
JALAN SENAYAN LAMUSUNG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

Fikri Ardiansyah¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

INTISARI

Intisari : Pengadaan tanah adalah upaya menyediakan akses infrastruktur untuk pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan agar pembebasan lahan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan wilayah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum memunculkan pro dan kontra serta konflik antara masyarakat pemilik lahan dengan pemerintah atau pelaksana proyek. Sebagian masyarakat setuju dan mengikuti arahan pemerintah, sementara yang lain menolak dan tidak mematuhi aturan pemerintah meskipun kebijakan tersebut untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pemegang hak atas tanah tidak memiliki pilihan selain melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya. Kesimpulan penelitian ini adalah, meskipun ada pro dan kontra serta konflik antara masyarakat dan pemerintah terkait nilai tanah dan pembebasan lahan, pemerintah daerah telah melakukan upaya sosialisasi, komunikasi, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil. Pelindungan hukum bagi pemilik tanah dalam proses pengadaan ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kepentingan Umum, Pelindungan Hukum, Pembangunan Jalan.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST AND
LEGAL PROTECTION OF HOLDERS OF PROPERTY RIGHTS OVER
THE ACQUIRED LAND (CASE STUDY OF THE CONSTRUCTION OF
SENAYAN LAMUSUNG ROAD, WEST SUMBAWA REGENCY)**

Fikri Ardiansyah¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

ABSTRACT

Abstract : *Land acquisition is an effort to provide access to infrastructure for development in Indonesia. This research aims to make land acquisition have a positive impact on people's lives and the development of the region. The methods used in this research are normative and empirical. The results show that the process of land acquisition for the public interest raises pros and cons and conflicts between landowners and the government or project implementers. Some people agree and follow the government's direction, while others refuse and disobey the government's rules even though the policy is for the public interest. Therefore, land rights holders have no choice but to release or surrender their land rights. The conclusion of this research is that, although there are pros and cons and conflicts between the community and the government regarding land value and land acquisition, the local government has made efforts to socialize, communicate, and negotiate to reach a fair agreement. Legal protection for landowners in this procurement process is important to ensure justice and legal certainty for all parties involved.*

Keyword: *Public Interest, Legal Protection, Land Acquisition.*

¹ Student of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Lecture of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta